

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek sosial, ekonomi, politik dan kultural, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan warga bangsa secara keseluruhan yang juga merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan hidup suatu negara. Menciptakan pembangunan yang berkesinambungan adalah hal penting yang harus dilakukan oleh sebuah Negara dengan tujuan untuk menciptakan kondisi bagi masyarakat untuk dapat menikmati lingkungan yang menunjang bagi hidup sehat, umur panjang dan menjalankan kehidupan yang produktif. Pembangunan Sumber Daya Manusia mencakup peningkatan kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan. Kapasitas dasar menurut Todaro (2003) yang sekaligus merupakan tiga nilai pokok keberhasilan pembangunan ekonomi adalah kecukupan (*sustenance*), jati diri (*selfsteem*), serta kebebasan (*freedom*). Kecukupan dalam hal ini merupakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keamanan.

Salah satu bagian penting dari kemajuan pembangunan suatu Negara adalah pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat mengusahakan agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan Negara yang sedang berkembang terus

berusaha untuk meningkatkan pembangunan di segala bidang (Jhingan, 2003)

Fungsi dasar dari kegiatan ekonomi pada dasarnya adalah untuk menyediakan sebanyak mungkin kebutuhan dasar masyarakat, atas dasar itulah syarat penentu keberhasilan ekonomi adalah membaiknya kualitas kehidupan seluruh lapisan masyarakat (Ginting, 2008). Pemerintah pusat sebagai pemangku kepemimpinan Negara Indonesia tentunya harus bertanggung jawab atas hal tersebut, di mana pembangunan merupakan pemicu dan pemacu dari pertumbuhan ekonomi di namun tentunya juga tidak dilaksanakan secara adil dan merata di seluruh wilayah di Indonesia

Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan dari pembangunan yang mendasar. Kesehatan merupakan kesejahteraan, sedangkan pendidikan merupakan hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga, keduanya merupakan hal yang penting untuk membentuk kapabilitas manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan (Todaro, 2003).

Sumber daya manusia merupakan modal dasar dari kekayaan suatu bangsa, karena manusia adalah faktor produksi yang bersifat aktif mengumpulkan modal, mengeksploitasi sumber-sumber daya alam, membangun organisasi-organisasi sosial, ekonomi politik dan melaksanakan pembangunan nasional. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka pendidikan merupakan suatu hal yang penting dan untuk itu peningkatan kualitas sumber daya manusia mutlak harus dilakukan. Karena sumber daya manusia yang berkualitas dapat memberikan efek *multiplier effect* terhadap pembangunan

suatu Negara, khususnya pembangunan bidang ekonomi. Secara umum tingkat pendidikan dan kesehatan dapat mewakili kualitas tenaga kerja karena dengan pendidikan, seseorang akan bertambah keterampilannya, dan dengan kesehatan seseorang akan lebih kuat dan jernih pemikirannya dalam bekerja (Notoatmodjo, 2009)

Pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas modal manusia (Mankiw, 2008). Modal manusia dapat mengacu pada pendidikan, namun juga dapat digunakan untuk jenis investasi manusia lainnya yaitu investasi yang mendorong ke arah populasi yang sehat yaitu kesehatan. Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar di suatu wilayah. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk mencapai kehidupan yang layak. Pendidikan memiliki peran yang penting dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2006).

Tujuan pembangunan nasional di Indonesia salah satunya adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 tercantum tujuan bangsa Indonesia salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada hakikatnya pembangunan ekonomi berfokus pada pembangunan manusianya,

sehingga perlu diprioritaskan alokasi belanja untuk keperluan peningkatan pembangunan manusia. Prioritas belanja dalam rangka peningkatan pembangunan manusia akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih spesifiknya pemerintah daerah harus bias mengalokasikan belanja daerah melalui pengeluaran pembangunan di sektor-sektor pendukung untuk meningkatkan IPM misalnya yang tercermin pada realisasi belanja daerah untuk bidang pendidikan, kesehatan dan sarana prasarana untuk menunjang investasi. Peningkatan pembangunan manusia dapat dicermati dari besar kecilnya IPM. Apabila IPM meningkat, maka tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat, maka tara pendidikan masyarakat juga akan meningkat (Todaro, 2002; Astri, 2013)

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia sudah dilakukan sejak tanggal 1 Januari 2001. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Diharapkan dengan adanya otonomi dan desentralisasi fiskal dapat lebih meratakan pembangunan sesuai dengan keinginan daerah untuk mengembangkan wilayah menurut potensi masing-masing. Otonomi daerah harus didefinisikan sebagai otonom bagi rakyat daerah dan bukan otonomi “daerah” dalam pengertian wilayah/territorial tertentu di tingkat loal. Otonomi daerah bukan hanya merupakan pelimpahan wewenang tetapi juga peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Berbagai mafaat dan argument yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah tidak

langsung dapat dianggap bahwa otonomi adalah system terbaik. (Kaloh, 2002).

Pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal terkandung tiga mosis utama, yaitu : (1)Menciptakan efisiensi dan efektivitas penelolahaan sumber daya daerah; (2)Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan mayarakat; (3)Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki wewenang yang besar untuk menggali endapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal daerah dapat lebih pemeratakan pembangunan sesuai dengan aspirasi local untuk mengembangkan wilayah menurut potensi asing-masing daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah memiliki fungsi dalam hal alokatif, distributif, stabilitif dan dinamisatif pemerintah harus dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Pemerintah akan melakukan pengeluaran belanja pembangunan sebagai langkah untuk menjalankan fungsi-fungsinya tersebut. Belanja pembangunan merupakan pengeluaran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Tujuan dari pembangunan salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Pemenuhan kebutuhan dasar akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya yang berkualitas akan mampu memberikan

Rendahnya tingkat pembangunan manusia dapat menjadi salah satu penyebab kemiskinan dan masalah serius bagi bangsa kedepannya, hal ini

merupakan masalah yang sangat penting dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang adil dan merata bagi semua masyarakat Indonesia. Rendahnya pembangunan manusia dapat dilihat dari *Human Development Index* (HDI) atau yang lebih dikenal sebagai Indeks Pembangunan Manusia yang dikeluarkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP). Pencapaian pembangunan manusia dalam suatu Negara mencakup tiga dimensi pembangunan manusia yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak dapat digambarkan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu negara dimana pembangunan suatu negara tidak bisa dikatakan berhasil apabila hanya melihat dari besarnya pendapatan domestik bruto saja tanpa meningkatkan pembangunan manusianya. Sering kali tingginya pendapatan domestik bruto suatu negara tidak diimbangi dengan tingkat pembangunan manusia yang sejalan pula. Hal ini pada akhirnya dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat yang diakibatkan oleh kesenjangan tingkat ekonomi masing-masing kelompok masyarakat.

Dengan adanya HDI tidak berarti mengesampingkan peran *Gross Domestic Bruto* sebagai tolak ukur kemajuan suatu negara namun merupakan sebuah tantangan bagi setiap negara untuk menterjemahkan GDP tersebut ke dalam pembangunan manusia. Terdapat tiga peran utama yang harus dapat dilaksanakan dengan baik dalam perekonomian oleh pemerintah Indonesia, menurut Guritno (2001) yaitu :

a. Peran Stabilisasi

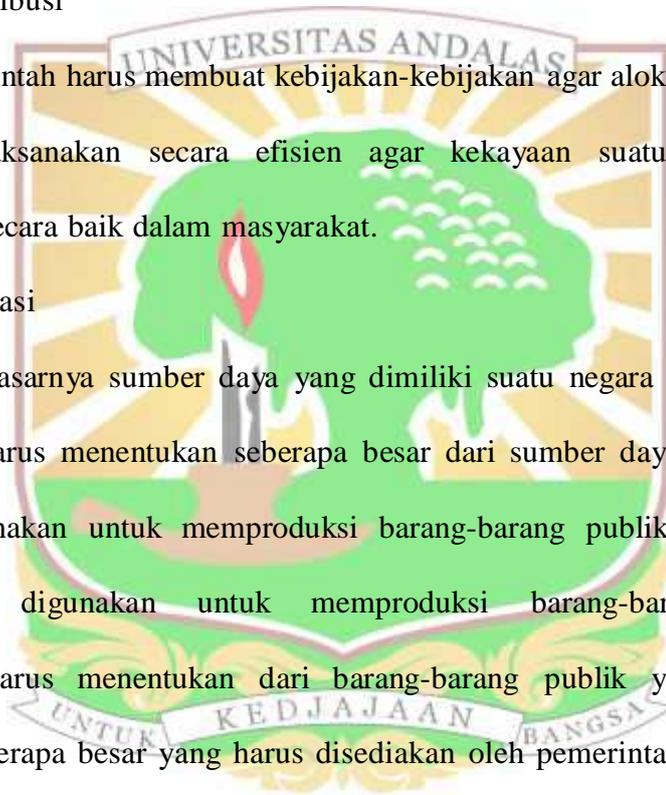
Pada pemerintahan modern saat ini, hampir semua negara menyerahkan roda perekonomiannya kepada pihak swasta/perusahaan. Pemerintah lebih berperan sebagai stabilisator, untuk menjaga agar perekonomian berjalan normal. Menjaga agar permasalahan yang terjadi pada satu sektor perekonomian tidak merembet ke sektor lain.

b. Peran Distribusi

Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar alokasi sumber daya ekonomi dilaksanakan secara efisien agar kekayaan suatu negara dapat terdistribusi secara baik dalam masyarakat.

c. Peran Alokasi

Pada dasarnya sumber daya yang dimiliki suatu negara adalah terbatas. Pemerintah harus menentukan seberapa besar dari sumber daya yang dimiliki akan dipergunakan untuk memproduksi barang-barang publik, dan seberapa besar akan digunakan untuk memproduksi barang-barang individu. Pemerintah harus menentukan dari barang-barang publik yang diperlukan warganya seberapa besar yang harus disediakan oleh pemerintah, dan seberapa besar yang dapat disediakan oleh rumah tangga perusahaan. Seiring dengan semakin meningkatnya kegiatan pemerintah dalam rangka menjalankan ke-tiga peran yang ada, maka tentunya diperlukan pula dana yang besar sebagai bentuk pengeluaran segala kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan ke-tiga peran tersebut. Pengeluaran pemerintah ini merupakan konsekuensi dari berbagai kebijakan yang diambil dan diterapkan melalui ke-tiga peran tersebut.



Pengeluaran pemerintah dapat digunakan sebagai cerminan kebijakan yang di ambil oleh pemerintah dalam suatu wilayah. Kebijakan pemerintah dalam tiap pembelian barang dan jasa guna pelaksanaan suatu program mencerminkan besarnya biaya yang akan dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan program tersebut. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai sektor-sekotr publik yang penting, diantara kesemua sektor publik saat ini yang menjadi prioritas pemerintah dalam mencapai pembangunan kualitas sumber daya manusia dalam kaitannya yang tercermin dari indeks pembangunan manusia adalah investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan diharapkan Investasi pada sektor ini akan berpengaruh pada peningkatan kualitas SDM dan mengurangi kemiskinan. Pembangunan kesehatan dan pendidikan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia, yang antara lain diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam pengukuran IPM, kesehatan dan pendidikan adalah salah satu komponen utama selain pendapatan. Kesehatan serta pendidikan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan membutuhkan manusia yang berkualitas sebagai modal dasar bagi pembangunan. Manusia dalam peranannya merupakan subjek dan objek pembangunan yang berarti manusia selain sebagai pelaku dari pembangunan juga merupakan sasaran pembangunan. Dalam hal ini dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendorong

peran manusia dalam, pembangunan. Oleh karenanya dibutuhkan investasi untuk dapat menciptakan pembentukan sumber daya manusia yang produktif. Investasi pada modal manusia diharapkan akan berpengaruh positif terhadap kinerja perekonomian yang salah satunya dapat diamati dari aspek tingkat pendidikan, kesehatan dan tingkat kemiskinan. Investasi modal manusia ini yang mencakup pengembangan Sumber Daya Manusia membutuhkan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran dalam mendorong peningkatan kualitas SDM. Menurut Mankiw (2008), pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas modal manusia.

Dalam hal ini modal manusia dapat mengacu pada pendidikan dan juga kesehatan. Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar di suatu wilayah. Menurut Meier dan Rauch (dalam Brata, 2002) pendidikan, atau lebih luas lagi adalah modal manusia, dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan. Hal ini karena pendidikan pada dasarnya adalah bentuk dari tabungan, menyebabkan akumulasi modal manusia dan pertumbuhan output agregat jika modal manusia merupakan input dalam fungsi produksi agregat. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk mencapai kehidupan yang layak. Pendidikan memiliki peran yang penting dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknolog modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2006). Selain itu rumah tangga masyarakat memegang peranan penting dalam pembangunan manusia, dimana pengeluaran rumah

tangga memiliki kontribusi langsung terhadap pembangunan manusia, seperti: makanan, kesehatan dan pendidikan. Pengeluaran rumah tangga ditentukan oleh pendapatan. Penduduk miskin akan lebih banyak atau bahkan seluruh pendapatannya digunakan untuk kebutuhan makanan, dibandingkan penduduk kaya. Akibatnya penduduk miskin tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak jika hanya mengandalkan pendapatannya. Di sinilah perlunya campur tangan pemerintah untuk membantu penduduk yang kurang mampu atau Miskin (Ginting, 2008)

Kemiskinan akan menghambat individu untuk mengonsumsi nutrisi bergizi, mendapatkan pendidikan yang layak serta menikmati lingkungan yang menunjang bagi hidup sehat. Dari sudut pandang ekonomi kesemuanya itu akan menghasilkan sumber daya manusia yang kurang berkualitas, atau dapat dikatakan memiliki tingkat produktivitas yang rendah. Hal ini juga berimbas pada terbatasnya upah/pendapatan yang dapat mereka peroleh. Sehingga dalam perkembangannya hal ini akan mempengaruhi tingkat pembangunan manusia di suatu daerah.

Indeks Pembangunan manusia di Indonesia beberapa tahun ini memang mengalami peningkatan, menurut UNDP IPM Indonesia telah naik sebesar 44,3% dalam kurun waktu tahun 1980-2014, namun peningkatan IPM Indonesia dibarengi dengan peningkatan IPM secara global, yang mengakibatkan peringkat IPM Indonesia berada pada posisi yang sama di tiga tahun terakhir pada peringkat ke-111.

IPM Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya, menurut

BPS Sumatera Barat Angka IPM Provinsi Sumatera Barat juga menunjukkan bahwa secara keseluruhan tingkat IPM Provinsi Sumatera Barat berbanding lurus dengan tingkat IPM pada skala nasional

Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya yang berada di pulau Sumatera, maka Provinsi Sumatera Barat masuk dalam peringkat Ke tiga dari sepuluh provinsi yang ada di pulau sumatera.

Tabel 1.1
Perbandingan IPM per Provinsi di Pulau Sumatera
(2010-2014)

Provinsi	2010	Rank	2011	Rank	2012	rank	2013	Rank	2014	Rank
Aceh	67.09	10	67.45	10	67.81	10	68.30	11	68.81	11
Sumatera Utara	67.09	11	67.34	11	67.74	11	68.36	10	68.87	10
Sumatera Barat	67.25	9	67.81	9	68.36	9	68.91	9	69.36	9
Riau	68.65	6	68.90	6	69.15	6	69.91	6	70.33	6
Jambi	65.39	18	66.14	18	66.94	17	67.76	17	68.24	17
Sumatera Selatan	64.44	22	65.12	22	65.79	22	66.16	23	66.75	23
Bengkulu	65.35	20	65.96	20	66.61	20	67.50	20	68.06	20
Lampung	63.71	24	64.20	25	64.87	25	65.73	26	66.42	26
Kep. Bangka	66.02	14	66.59	15	67.21	14	67.92	15	68.27	16
Kepulauan Riau	71.13	4	71.61	4	72.36	4	73.02	4	73.40	4

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Barat mengalami “jalan ditempat” dalam peringkat IPM per provinsi yang ada di Indonesia. Sumatera Barat mengalami pertumbuhan IPM secara bertahap dari tahun 2010 hingga tahun 2014 namun peingkatnya tetap *stuck* pada peringkat 9 dalam urutan IPM provinsi-provinsi yang ada di Indonesia.

Selain itu kemiskinan merupakan salah satu masalah penting

yang dihadapi pemerintah yang mempengaruhi pembangunan manusia di Sumatera Barat. Tingkat kemiskinan yang tinggi membuat individu tidak mempunyai alokasi dana dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya salah satunya yang berhubungan dengan proses pembangunan manusia. Masalah kemiskinan merupakan hal penting yang perlu ditangani pemerintah daerah Sumatera Barat.

Tabel 1.3

**Jumlah Penduduk Miskin
di Pulau Sumatera (ribuan) Tahun 2014**

Provinsi	2014	%
Aceh	837.42	16,98
Sumatera Utara	1360.599	9,85
Sumatera Barat	354.738	5,41
Riau	498.281	6,53
Jambi	281.751	10,67
Sumatera Selatan	1085.795	12,96
Bengkulu	316.5	17,19
Lampung	1143.934	10,68
Kep. Bangka	67.227	3,04
Kepulauan Riau	124.171	5,61

Sumber: BPS, Statistik Sumatera, 2014

Kemiskinan adalah salah satu hal yang dapat menghambat perkembangan ekonomi karena kemiskinan akan membuat seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan secara fisik, makanan, dan kesehatan, sehingga menjadikan kualitas input perekonomian yang rendah.

Jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat memang terbilang cukup rendah disbanding dengan beberapa provinsi lainnya di pulau Sumatera. Namun IPM Sumatera Barat hanya bertahan di posisi 9, dibandingkan dengan Riau yang menempati posisi 6 (lih. Table 1.2) sementara jumlah penduduk miskin di daerah Riau lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk miskin yang ada di Sumatera

Barat.

Pemerintah daerah Sumatera Barat mengalokasikan dana anggaran belanja untuk kedua sektor pendidikan dan kesehatan yang cukup besar dalam komponen belanja pembangunan daerah menurut data dari DJPK Proporsi pengeluaran di sektor pendidikan selalu mengalami penurunan di beberapa tahun terakhir, ini menjadi menarik meskipun jumlahnya meningkat namun proporsinya menurun, berbeda dengan pengeluaran di sektor kesehatan, namun dengan meningkatnya belanja pemerintah Sumatera Barat dari tahun ke tahun untuk sektor pendidikan dan kesehatan serta semakin menurunnya tingkat kemiskinan, peningkatan laju pembangunan manusia sudah seharusnya juga dapat meningkat secara signifikan sebesar peningkatan alokasi pengeluaran di kedua sektor tersebut serta penurunan jumlah penduduk miskin. Tetapi dalam kenyataannya perkembangan IPM Sumatera Barat mengalami kenaikan walaupun kenaikannya tidaklah terlalu besar.

Berdasarkan latar belakang di atas menarik untuk dibahas mengenai pembangunan manusia di Sumatera Barat. Selain itu di dalam penelitian ini juga akan dilihat bagaimana **Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan, Tingkat Penduduk Miskin serta Pendapatan Perkapita penduduk Terhadap Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Barat.**

1.2 Rumusan Masalah

Pembangunan ekonomi suatu daerah tidak hanya melihat berapa besar tingkat *Gross Domestic Bruto* saja tetapi melihat sejauh mana pembangunan tersebut dapat diterjemahkan kedalam beberapa aspek sehingga muncul suatu kondisi yang sejahtera.

Salah satu bentuk keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari tingkat pembangunan manusia suatu daerah. Pembangunan manusia merupakan suatu bentuk investasi modal manusia dalam usaha ikut serta dalam pembangunan nasional. Oleh karenanya dibutuhkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah peningkatan pembangunan manusia. Salah satu bukti keseriusan pemerintah tersebut adalah lewat pengeluaran pemerintah yang merupakan cerminan bukti konkrit peran pemerintah dalam mengatur perekonomian. Sektor pengeluaran pemerintah yang cukup penting dan berpengaruh terhadap pembangunan manusia adalah pengeluaran di bidang pendidikan dan kesehatan.

Tingkat kemiskinan yang tinggi → Kemampuan masyarakat untuk memenuhi kehidupannya akan menurun, juga kemampuan untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas diri sebagai input perekonomian melalui pendidikan formal dan non formal.

Oleh karena itu pemerintah berperan untuk menanggulangi hal tersebut dengan adanya bantuan-bantuan yang akan membantu masyarakat melalui pengeluaran di bidang pendidikan dan kesehatan yang iarpkan dengan kebijakan tersebut dapat meningkatkan IPM di Sumatera Barat.

Dari masalah tersebut, muncul pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Barat tahun 2010-2015?
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Barat tahun 2010-2015?
3. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Barat tahun 2010-2015?
4. Bagaimana Pengaruh Pendapatan perkapita penduduk terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Barat tahun 2010-2015?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan terhadap pembangunan manusia di Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan terhadap pembangunan manusia di Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh jumlah penduduk miskin terhadap pembangunan manusia di Sumatera Barat.
4. Untuk mengetahui bagaimana pendapatan perkapita berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan studi dan tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi pada umumnya dan mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan pada khususnya.

2. Dapat digunakan sebagai sumber masukan yang berguna bagi pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang serta menjadi referensi.
3. Dapat digunakan sebagai masukan bagi peneliti-peneliti yang lain dengan tipe penelitian sejenis.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian dari pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang alasan mengapa memilih penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup serta sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Literatur

Bab II ini adalah tinjauan literatur. Pada Bab ini penulis menjelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia, hubungan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia. Pada bagian ini juga dijelaskan komponen yang terdapat pada indeks pembangunan manusia. Selain itu pada bab ini juga dijelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait hubungan pertumbuhan ekonomi dengan indeks pembangunan manusia.

Bab III: Metodologi Penelitian

Membahas tentang daerah penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, serta definisi variabel.

Bab IV: Gambaran Umum

Bab ini menggambarkan secara singkat tentang pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat serta perkembangan indeks pembangunan manusia beserta komponennya selama periode pengamatan.

Bab V : Hasil dan Pembahasan

Bagian ini membahas proses hasil dan analisis dari variabel-variabel yang diteliti serta juga membahas bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Bab VI : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan. Dalam bab ini juga berisi saran-saran yang direkomendasikan kepada pihak-pihak tertentu atas dasar temuan.

